

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran hasil penelitian mengenai hipotesis dengan pembahasan pada bagian akhir. Hasil penelitian dan pembahasan dipisahkan berdasarkan kepentingan masing-masing. Penelitian ini menggunakan alat bantu yakni perangkat lunak SPSS versi 23. Adapun penjelasan hasil penelitian dan pembahasan masing-masing negara sebagai berikut ini:

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia. Tahun penelitian mencakup data pada tahun 2012-2014, hal ini dimaksudkan agar lebih mencerminkan kondisi saat ini. Berdasarkan metode *purposive sampling* yang telah ditetapkan pada bab III, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 33 (Indonesia) dan 39 (Malaysia) Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria. Adapun rincian pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Prosedur Pemilihan Sampel di Indonesia**

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Total
1.	Bank Umum Syariah yang menerbitkan <i>annual report</i> tahun 2012-2014	11	11	11	<b>33</b>
2.	Bank Umum Syariah yang tidak melaporkan laporan <i>annual report</i> secara berturut-turut	(0)	(0)	(0)	<b>(0)</b>
3.	<b>Total Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel</b>	11	11	11	<b>33</b>
4.	Data <i>outlier</i>	(0)	(0)	(0)	<b>(33)</b>
<b>Total Bank Umum Syariah yang diteliti</b>		11	11	11	<b>33</b>
Sumber: hasil pengolahan data					

**Tabel 4.2**  
**Prosedur Pemilihan Sampel di Malaysia**

N o	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Total
1	Bank Umum Syariah yang menerbitkan <i>annual report</i> tahun 2012-2014	16	16	16	<b>48</b>
2	Bank Umum Syariah yang tidak melaporkan <i>annual report</i> secara berturut-turut	(0)	(0)	(0)	<b>(0)</b>
3	<b>Total Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel</b>	16	16	16	<b>48</b>
4	Data <i>outlier</i>	(3)	(3)	(3)	<b>(9)</b>
<b>Total Bank Umum Syariah yang diteliti</b>		13	13	13	<b>39</b>
Sumber: hasil pengolahan data					

## B. Uji Kualitas Data

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif ditunjukkan dalam Tabel 4.3 dan Tabel 4.4.

**Tabel 4.3**  
**Statistik Deskriptif**  
**Indonesia**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ISR_SCORE	33	.64	1.00	.8691	.11270
RJBDPS	33	.00	1.00	.8639	.30444
JRDPS	33	9.00	30.00	14.6364	4.21173
JLKRMN	33	3.00	8.00	4.5758	1.41488
JRKRMN	33	1.00	34.00	7.5758	7.07562
STKPAS	33	.00	.99	.2955	.37171
STKPIS	33	.00	.99	.4721	.45155
Valid N (listwise)	33				

Sumber : Output SPSS 23.0

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pengamatan dalam penelitian di Indonesia sebanyak 33 sampel, adapun hasil statistik deskriptif sebagai

berikut: Variabel pengungkapan ISR (ISR\_SCORE) memiliki nilai minimum sebesar 0,64; nilai maksimum sebesar 1,00 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,8691 dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,11270.

Variabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (RJBAPS) memiliki nilai minimum sebesar 0,00; nilai maksimum sebesar 1,00; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,8639; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,30444.

Variabel Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (JRAPS) memiliki nilai minimum sebesar 9,00; nilai maksimum sebesar 30,00; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 14,6364; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 4,21173.

Variabel Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi (JKRMN) memiliki nilai minimum sebesar 3,00; nilai maksimum sebesar 8,00 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,5758; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 1.41488.

Variabel Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (JRKMN) memiliki nilai minimum sebesar 1,00; nilai maksimum sebesar 34,00; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 7,5758; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 7,07562.

Variabel Struktur Kepemilikan Asing (STKPAS) memiliki nilai minimum sebesar 0,00; nilai maksimum sebesar 0,99; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2955; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,37171. .

Variabel Struktur Kepemilikan Institusional (STKPIS) memiliki nilai minimum sebesar 0,00; nilai maksimum sebesar 0,99; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,4721; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,45155.

**Tabel 4.4**  
**Statistik Deskriptif**  
**Malaysia**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ISR_SCORE	39	.71	1.00	.8441	.07051
RJBDPS	39	.50	1.00	.8338	.21925
JRDPS	39	5.00	17.00	8.7436	3.87786
JLKRMN	39	3.00	12.00	6.4103	2.06114
JRKRMN	39	1.00	19.00	7.3590	4.57963
STKPAS	39	.00	.99	.4074	.34591
STKPIS	39	.24	.97	.6623	.20728
Valid N (listwise)	39				

Sumber: Output SPSS 23.0

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pengamatan dalam penelitian di Indonesia sebanyak 39 sampel, adapun hasil statistik deskriptif sebagai berikut: Variabel pengungkapan ISR (ISR\_SCORE) memiliki nilai minimum sebesar 0,71; nilai maksimum sebesar 1,00 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,8441 dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,07051.

Variabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (RJBDPS) memiliki nilai minimum sebesar 0,50; nilai maksimum sebesar 1,00; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,8338; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,21925.

Variabel Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (JRDPS) memiliki nilai minimum sebesar 5,00; nilai maksimum sebesar 17,00; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 7,3590; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 3,87786.

Variabel Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi (JLKRMN) memiliki nilai minimum sebesar 3,00; nilai maksimum sebesar 12,00 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 6,4103; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 2,06114.

Variabel Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (JRKRMN) memiliki nilai minimum sebesar 1,00; nilai maksimum sebesar 19,00; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 7,5758; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 4,57963.

Variabel Struktur Kepemilikan Asing (STKPAS) memiliki nilai minimum sebesar 0,00; nilai maksimum sebesar 0,99; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,4074; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,34591.

Variabel Struktur Kepemilikan Institusional (STKPIS) memiliki nilai minimum sebesar 0,24; nilai maksimum sebesar 0,97; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,6623; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,20728.

## C. Analisis Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.5 dan

Tabel 4.6.

**Tabel 4.5**  
**Uji Normalitas**  
**Indonesia**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.09098498
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.108
	Positive	.098
	Negative	-.108
Test Statistic		.108
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan Tabel 4.5 didapatkan hasil bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar  $0,200 > \alpha (0,05)$ . Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian di Indonesia berdistribusi normal.

**Tabel 4.6**  
**Uji Normalitas**  
**Malaysia**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		39
Normal	Mean	.0000000
Parameters(a,b)	Std. Deviation	.05998245
Most Extreme	Absolute	.181
Differences	Positive	.181
	Negative	-.107
Test Statistic		.181
Asymp. Sig. (2-tailed)		.154

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 23.0

Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan hasil bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar  $0,154 > \alpha (0,05)$ . Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian di Malaysia berdistribusi normal.

## 2. Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.7 dan

Tabel 4.8.

**Tabel 4.7**  
**Uji Autokorelasi**  
**Durbin-Watson**  
**Indonesia**  
**Model Summary(b)**

Model	Durbin-Watson
1	0,826

Sumber: Output SPSS 23.0

Berdasarkan Tabel 4.7 didapatkan hasil bahwa nilai DW sebesar 0,826. Artinya  $-2 < dW < 2$ , model Indonesia  $-2 < 0,826 < 2$  menunjukkan

tidak adanya autokorelasi. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian di Indonesia tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 4.8**  
**Uji Autokorelasi**  
**Durbin-Watson**  
**Malaysia**  
**Model Summary(b)**

Model	Durbin-Watson
1	0,475

Sumber: Output SPSS 23.0

Berdasarkan Tabel 4.8 didapatkan hasil bahwa nilai DW sebesar 0,475. Artinya  $-2 < dW < 2$ , model Indonesia  $-2 < 0,475 < 2$  menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian di Malaysia tidak terjadi autokorelasi.

### 3. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada

Tabel 4.9 dan Tabel 4.10.

**Tabel 4.9**  
**Uji Multikolinearitas**  
**Indonesia**

		Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.515	.122		4.210	.000		
	RJBDPS	.035	.084	.095	.420	.678	.490	2.041
	JRDPS	.008	.005	.290	1.495	.147	.665	1.503
	JLKRMN	.034	.014	.427	2.442	.022	.819	1.221
	JRKRMN	.003	.004	.169	.709	.485	.443	2.259
	STKPAS	.008	.061	.027	.136	.893	.626	1.598
	STKPIS	.068	.044	.271	1.524	.139	.795	1.258

a. Dependent Variable: ISR\_SCORE

Berdasarkan Tabel 4.9 didapatkan hasil bahwa VIF masing-masing variabel  $\leq 10$ . Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (RJBDPS)

sebesar 2,041; Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (JRDPS) sebesar 1,503; Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi (JLKRMN) sebesar 1,221; Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (JRKRMN) sebesar 2,259; Struktur Kepemilikan Asing (STKPAS) sebesar 1,598; Struktur Kepemilikan Institusional (STKPIS) sebesar 1,258. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian di Indonesia tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 4.10**  
**Uji Multikolinearitas**  
**Malaysia**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1							
(Constant)	.941	.085		11.111	.000		
RJBDPS	-.145	.056	-.450	-2.577	.015	.740	1.351
JRDPS	.003	.004	.150	.741	.464	.553	1.808
JLKRMN	.001	.007	.037	.184	.855	.564	1.772
JRKRMN	-.003	.003	-.163	-.907	.371	.697	1.434
STKPAS	.044	.034	.214	1.300	.203	.835	1.198
STKPIS	-.010	.072	-.030	-.144	.886	.506	1.976

a. Dependent Variable: ISR\_SCORE

Sumber: Output SPSS 23.0

Berdasarkan Tabel 4.10 didapatkan hasil bahwa VIF masing-masing variabel  $\leq 10$ . Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (RJBDPS) sebesar 1,351; Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (JRDPS) sebesar 1,808; Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi (JLKRMN) sebesar 1,772; Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (JRKRMN) sebesar 1,434; Struktur Kepemilikan Asing (STKPAS) sebesar 1,198; Struktur Kepemilikan Institusional (STKPIS) sebesar 1,976. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian di Malaysia tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada

Tabel 4.11 dan Tabel 4.12.

**Tabel 4.11**  
**Uji Heteroskedastisitas**  
**Indonesia**  
**Coefficients(a)**

Model		Sig.
1	(Constant)	.039
	RJBDPS	.826
	JRDPS	.990
	JLKRMN	.501
	JRKRMN	.331
	STKPAS	.757
	STKPIS	.280

a Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Output SPSS 23.0

Berdasarkan Tabel 4.11 didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen pada penelitian ini lebih besar dari  $\alpha$  (0,05). Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (RJBDPS) sebesar 0,826 Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (JRDPS) sebesar 0,990; Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi (JLKRMN) sebesar 0,501; Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (JRKRMN) sebesar 0,331; Struktur Kepemilikan Asing (STKPAS) sebesar 0,757; Struktur Kepemilikan Institusional (STKPIS) sebesar 0,280 Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian di Indonesia tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4.12**  
**Uji Heteroskedastisitas**  
**Malaysia**  
**Coefficients(a)**

Model		Sig.
1	(Constant)	.219
	RJBDPS	.704
	JRDPS	.601
	JLKRMN	.258
	JRKRMN	.205
	STKPAS	.591
	STKPIS	.626

a Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Output SPSS 23.0

Berdasarkan Tabel 4.12 didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen pada penelitian ini lebih besar dari  $\alpha$  (0,05). Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (RJBDPS) sebesar 0,704 Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (JRDPS) sebesar 0,601; Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi (JLKRMN) sebesar 0,258; Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (JRKRMN) sebesar 0,205; Struktur Kepemilikan Asing (STKPAS) sebesar 0,591; Struktur Kepemilikan Institusional (STKPIS) sebesar 0,626 Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian di Malaysia tidak terjadi heteroskedastisitas.

## D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

### 1. Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada

Tabel 4.13 dan Tabel 14.

**Tabel 4.13**  
**Uji Koefisien Determinasi**  
**Indonesia**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,591 <sup>a</sup>	,349	,199	,10087

a Predictors: (Constant), STKPIS, JRKRMN, JRDPS, JLKRMN, STKPAS, RJBDPS

b Dependent Variable: ISR\_SCORE

Sumber: Output SPSS 23.0

Berdasarkan Tabel 4.13 didapatkan hasil bahwa besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) adalah 0,199 atau 19,9%, hal ini menunjukkan bahwa *Islamic Social Reporting* di Indonesia sebesar 19,9% oleh variabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (RJBDPS), Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (JRDPS), Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi (JLKRMN), Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (JRKRMN), Struktur Kepemilikan Asing (STKPAS), dan Struktur Kepemilikan Institusional (STKPIS). Sedangkan sisanya 80,1% (100% - 19,9%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

**Tabel 4.14**  
**Uji Koefisien Determinasi**  
**Malaysia**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.526(a)	.276	.141	.06536

Model Summary<sup>b</sup>

a Predictors: (Constant), STKPIS, STKPAS, RJBDPS, JRKRMN, JLKRMN, JRDPS

b Dependent Variable: ISR\_SCORE

Sumber : Output SPSS 23.0

Berdasarkan Tabel 4.14 didapatkan hasil bahwa besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) adalah 0,141 atau 14,1%, hal ini menunjukkan bahwa *Islamic Social Reporting* di Malaysia sebesar 14,1% oleh variabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (RJBDPS), Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (JRDPS), Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi (JLKRMN), Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (JRKRMN), Struktur Kepemilikan Asing (STKPAS), dan Struktur Kepemilikan Institusional (STKPIS). Sedangkan sisanya 85,9% (100% - 14,1%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

## 2. Uji Signifikan Simultan (Uji *F*)

Hasil uji signifikan simultan (Uji *F*) ditunjukkan pada Tabel 4.15 dan Tabel 4.16.

**Tabel 4.15**  
**Uji Signifikan Simultan (Uji *F*)**  
**Indonesia**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24.887	6	4.148	251.757	.000(a)
	Residual	.445	27	.016		
	Total	25.332	33			

Sumber: Output SPSS 23.0

Berdasarkan Tabel 4.15 didapatkan hasil bahwa nilai signifikan sebesar  $0,000 < \alpha (0,05)$ . Jadi, variabel independen (rangkap jabatan dewan pengawas syariah, jumlah rapat dewan pengawas syariah, jumlah komite remunerasi dan nominasi, jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi, struktur kepemilikan asing dan struktur kepemilikan institusional) berpengaruh simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (*Pengungkapan Islamic Social Reporting*).

**Tabel 4.16**  
**Uji Signifikan Simultan (Uji *F*)**  
**Malaysia**  
**ANOVA(b)**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27.313	6	4.552	226.158	.000(a)
	Residual	.664	33	.020		
	Total	27.977	39			

Sumber: Output SPSS 23.0

Berdasarkan Tabel 4.16 didapatkan hasil bahwa nilai signifikan sebesar  $0,000 < \alpha (0,05)$ . Jadi, variabel independen (rangkap jabatan dewan pengawas syariah, jumlah rapat dewan pengawas syariah, jumlah komite remunerasi dan nominasi, jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi, struktur kepemilikan asing dan struktur kepemilikan institusional) berpengaruh simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (*Pengungkapan Islamic Social Reporting*).

### 3. Uji Parsial (Uji *t*)

Hasil uji parsial (Uji *t*) dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel

4.17 dan Tabel 4.18.

**Tabel 4.17**  
**Uji Parsial (Uji *t*)**  
**Indonesia**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	<i>T</i>		Sig.
	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error	
1 (Constant)	,515	,122		4,210		,000
RJBDPS	,035	,084	,095	,420		,678
JRDPS	,008	,005	,290	1,495		,147
JLKRMN	,034	,014	,427	2,442		,022
JRKRMN	,003	,004	,169	0,709		,485
STKPAS	,008	,061	,027	,136		,893
STKPIS	,068	,044	,271	1,524		,139

a Dependent Variable: ISR\_SCORE

Sumber: Output SPSS 23.0

Berdasarkan pengujian pada Tabel 4.17 dapat dirumuskan model regresi sebagai berikut:

$$\text{ISRSCOREI} = 0,515 + 0,034\text{JLKRMN} + \varepsilon$$

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian:

*a.* Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan rangkap jabatan dewan pengawas syariah memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,035 dengan signifikansi sebesar  $0,678 > \alpha (0,05)$  sehingga rangkap jabatan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_{1a}$ ) yang menyatakan rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR di perbankan Indonesia dinyatakan **ditolak**.

*b.* Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan ISR

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan jumlah rapat dewan pengawas syariah memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,008 dengan signifikansi sebesar  $0,147 > \alpha (0,05)$  sehingga jumlah rapat dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dengan demikian hipotesis kedua ( $H_{2a}$ ) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR di perbankan Indonesia dinyatakan **ditolak**.

c. Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi Terhadap Pengungkapan ISR

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan jumlah komite remunerasi dan nominasi memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,034 dengan signifikansi sebesar  $0,022 < \alpha (0,05)$  sehingga jumlah komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Dengan demikian hipotesis ketiga ( $H_{3a}$ ) yang menyatakan bahwa jumlah komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR di perbankan Indonesia dinyatakan **diterima**.

d. Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Terhadap Pengungkapan ISR

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,003 dengan signifikansi sebesar  $0,485 > \alpha (0,05)$  sehingga jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dengan demikian hipotesis keempat ( $H_{4a}$ ) yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR di perbankan Indonesia dinyatakan **ditolak**.

e. Struktur Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan ISR

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan struktur kepemilikan asing memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,008 dengan signifikansi sebesar  $0,893 > \alpha (0,05)$  sehingga struktur kepemilikan

asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dengan demikian hipotesis keempat ( $H_{5a}$ ) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR di perbankan Indonesia dinyatakan **ditolak**.

f. Struktur Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan ISR

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan struktur kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,068 dengan signifikansi sebesar  $0,139 > \alpha (0,05)$  sehingga struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dengan demikian hipotesis keempat ( $H_{6a}$ ) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR di perbankan Indonesia dinyatakan **ditolak**.

**Tabel 4.18**  
**Uji Parsial (Uji  $t$ )**  
**Malaysia**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.941	.085		11.111	.000		
	RJBDPS	-.145	.056	-.450	-2.577	.015	.740	1.351
	JRDPS	.003	.004	.150	.741	.464	.553	1.808
	JLKRMN	.001	.007	.037	.184	.855	.564	1.772
	JRKRMN	-.003	.003	-.163	-.907	.371	.697	1.434
	STKPAS	.044	.034	.214	1.300	.203	.835	1.198
	STKPIS	-.010	.072	-.030	-.144	.886	.506	1.976

a. Dependent Variable: ISR\_SCORE

Sumber: Output SPSS 23.0

Berdasarkan pengujian pada Tabel 4.17 dapat dirumuskan model regresi sebagai berikut:

$$\text{ISRSCOREM} = 0,941 - 0,145R\text{JBDPS} + \varepsilon$$

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian:

*a.* Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan rangkap jabatan dewan pengawas syariah memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar -0,145 dengan signifikansi sebesar  $0,015 < \alpha (0,05)$  sehingga rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_{1b}$ ) yang menyatakan rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR di perbankan Malaysia dinyatakan **diterima**.

*b.* Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan ISR

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan jumlah rapat dewan pengawas syariah memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,003 dengan signifikansi sebesar  $0,464 > \alpha (0,05)$  sehingga jumlah rapat dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dengan demikian hipotesis kedua ( $H_{2b}$ ) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR di perbankan Malaysia dinyatakan **ditolak**.

*c.* Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi Terhadap Pengungkapan ISR

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan jumlah komite remunerasi dan nominasi memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,001 dengan signifikansi sebesar  $0,855 > \alpha (0,05)$  sehingga jumlah komite remunerasi dan nominasi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dengan demikian hipotesis ketiga ( $H_{3b}$ ) yang menyatakan bahwa jumlah komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR di perbankan Malaysia dinyatakan **ditolak**.

d. Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Terhadap Pengungkapan ISR

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar -0,003 dengan signifikansi sebesar  $0,371 > \alpha (0,05)$  sehingga jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dengan demikian hipotesis keempat ( $H_{4b}$ ) yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR di perbankan Malaysia dinyatakan **ditolak**.

e. Struktur Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan ISR

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan struktur kepemilikan asing memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,044 dengan signifikansi sebesar  $0,203 > \alpha (0,05)$  sehingga struktur kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dengan demikian

hipotesis keempat ( $H_{5b}$ ) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR di perbankan Malaysia dinyatakan **ditolak**.

f. Struktur Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan ISR

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan struktur kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar -0,010 dengan signifikansi sebesar  $0,886 > \alpha (0,05)$  sehingga struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dengan demikian hipotesis keempat ( $H_{6b}$ ) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR di perbankan Malaysia dinyatakan **ditolak**.

#### 4. Uji Chow test

Uji Chow merupakan alat untuk menguji *test for equality of coefficients* atau uji kesamaan koefisien. Uji ini dilakukan untuk menguji model regresi untuk kelompok yang digunakan dimana dalam penelitian ini ada dua kelompok yakni bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia.

$$F = \frac{(RSSr - RSSur)/k}{(RSSur)/(n1 + n2 - 2k)}$$

$$RSSur = 0,445 + 0,664 = 1,109$$

$$RSSr = 1,724$$

$$n = 72$$

$$k = 6$$

$$F = \frac{(1,724 - 1,109)/6}{(1,109)/(33 + 39 - 12)}$$

$$F = \frac{0,1025}{0,0185} = 5,54$$

F hitung = 5,54

F Tabel = 2,24

F hitung > F Tabel

Hasil Uji *Chow test* menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 5,54 dan F Tabel sebesar 2,24 yang berarti pengaruh rangkap jabatan dewan pengawas syariah, jumlah rapat dewan pengawas syariah, jumlah komite remunerasi dan nominasi, jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi, struktur kepemilikan asing dan struktur kepemilikan institusional terhadap pengungkapan ISR antara perbankan Indonesia dan Malaysia memang berbeda.

## E. Pembahasan (Interpretasi)

### 1. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR

Menurut Usamah (2010) mengatakan bahwa kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah di bank syariah diperlukan adanya pembatasan terhadap jumlah rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah, yang bertujuan agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih fokus, semakin sedikit rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah maka dapat bekerja lebih fokus dan profesional.

Hasil uji parsial di perbankan syariah Indonesia menunjukkan bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis pertama ( $H_{1a}$ ).

Hasil penelitian pada perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa dengan adanya rangkap jabatan tidak memengaruhi kinerja masing-masing anggota dewan pengawas syariah dalam melakukan suatu pekerjaan termasuk dalam melakukan suatu pengungkapan, hal ini mungkin terjadi karena masing-masing anggota yang melakukan rangkap jabatan masih bertanggung jawab dalam pekerjaannya walaupun memiliki rangkap jabatan.

Berbeda dengan hasil uji parsial di perbankan syariah Malaysia menunjukkan bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR yang berarti hasil penelitian menerima hipotesis pertama ( $H_{1b}$ ). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Usamah (2010) menunjukkan bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja kepatuhan syariah atas pembiayaan.

Hasil penelitian pada perbankan syariah di Malaysia peneliti menduga bahwa semakin sedikit dewan pengawas syariah melakukan rangkap jabatan maka dewan pengawas syariah akan semakin fokus dalam bekerja termasuk dalam melakukan suatu pengungkapan.

## **2. Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan ISR**

Menurut Ridhwan dan Wijaya (2014) mengatakan bahwa risalah rapat DPS memuat keputusan dan opini syariah yang diambil dalam rapat DPS, risalah rapat tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh seluruh anggota DPS.

Hasil uji parsial di perbankan syariah Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis kedua ( $H_{2a}$  dan  $H_{2b}$ ).

Hasil penelitian pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa seringkali dewan pengawas syariah melakukan pertemuan atau rapat belum tentu pengungkapan ISR di perbankan menjadi lebih baik, ini diduga karena setiap hasil rapat kemungkinan tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pengelola perbankan lainnya, sehingga terjadi kekurangan atau kesalahan dalam pengungkapan laporan. Tindak lanjut dari hasil rapat dewan pengawas syariah menjadi bentuk pengawasan untuk pengungkapan perbankan yang lebih baik.

## **3. Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi Terhadap Pengungkapan ISR**

Hasil uji parsial di perbankan syariah Indonesia menunjukkan bahwa jumlah komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR yang berarti hasil penelitian menerima hipotesis ketiga ( $H_{3a}$ ). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Kusnadi (2003) menunjukkan bahwa komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap keagenan.

Hasil penelitian pada perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa nilai maksimum jumlah komite remunerasi dan nominasi di Indonesia lebih sedikit dibandingkan yang ada di Malaysia hal ini mungkin menunjukkan bahwa semakin sedikit jumlah komite remunerasi dan nominasi maka tingkat pengungkapan ISR yang dilakukan lebih baik.

Berbeda dengan hasil uji parsial di perbankan syariah Malaysia menunjukkan bahwa jumlah komite remunerasi dan nominasi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis ketiga ( $H_{3b}$ ).

Hasil penelitian pada perbankan syariah di Malaysia menunjukkan bahwa dengan ada atau tidaknya komite remunerasi dan nominasi tidak akan memengaruhi kinerja masing – masing anggota termasuk dalam melakukan pengungkapan ISR.

#### **4. Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Terhadap Pengungkapan ISR**

Hasil uji parsial di perbankan syariah Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis keempat ( $H_{4a}$  dan  $H_{4b}$ ). Hasil penelitian ini sesuai dengan

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utami *et al.* (2012), Supriyono *et al.* (2014) dan Hafiz *et al.* (2015) menunjukkan bahwa Jumlah Rapat Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Hasil penelitian pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa seringkali komite remunerasi dan nominasi melakukan pertemuan, perbankan belum tentu mampu mengungkapkan ISR lebih baik. Hal ini mungkin tergantung pada kualitas rapat yang dijalankan, bukan pada kuantitasnya. Kondisi komite remunerasi dan nominasi yang mempunyai rangkap jabatan juga perlu diperhatikan. Beberapa anggota komite remunerasi dan nominasi tidak hanya bekerja di satu bank saja. Kondisi ini diduga karena adanya benturan aktivitas sehingga sangat mungkin terjadinya anggota komite remunerasi dan nominasi tidak hadir dalam rapat dikarenakan menghadiri rapat pada bank lain.

## **5. Struktur Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan ISR**

Perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih luas (Huafang dan Jianguo, dalam Rustiarini, 2011).

Hasil uji parsial di perbankan syariah Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa struktur kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis kelima ( $H_{5a}$  dan  $H_{5b}$ ). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliawati dan Sukirman (2015) yang menunjukkan

bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Hasil penelitian pada perbankan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing yang besar tidak selalu *concern* terhadap peningkatan kualitas informasi yang harus diberikan oleh perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan (Simerly dan Li, dalam Sutedi 2012:32).

## **6. Struktur Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga akan memengaruhi tingkat pengungkapan wajib (Boediono dalam Utami *et al.*, 2012).

Hasil uji parsial di perbankan syariah Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis keenam ( $H_{6a}$  dan  $H_{6b}$ ). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rustiarini (2011) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Hasil penelitian pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa kepemilikan saham institusional diduga masih belum efektif dalam memonitoring tingkat pengungkapan, hal ini juga mungkin terjadi karena kepemilikan institusi di perbankan syariah Indonesia dan Malaysia belum mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebagai salah

satu kriteria dalam melakukan investasi, sehingga para investor tidak terlalu menekankan perbankan syariah untuk mengungkapkan ISR secara detail di dalam laporan tahunan.

## **7. Perbedaan pengaruh *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia**

Hasil Uji Chow menunjukkan adanya perbedaan pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan *conten analysis* yang telah dilakukan, ditemukan bahwa rata-rata skor tingkat pengungkapan ISR perbankan syariah di Indonesia selama tahun 2012-2014 lebih tinggi daripada tingkat pengungkapan ISR perbankan syariah di Malaysia hal ini juga sesuai dengan penelitian oleh Junaidi (2015) yang menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah di Indonesia yang dijadikan sampel jika di ukur menggunakan *Islamic Social Reporting* (ISR) cukup baik.

Adanya perbedaan pengungkapan ISR juga dikarenakan perbedaan wilayah dan karena perbedaan analisis *cost and benefit* yang dilakukan masing-masing bank syariah di kedua negara. Belum adanya peraturan yang mengatur mengenai penerapan pengungkapan ISR dan kurang spesifiknya indeks ISR yang ada juga menyebabkan pengungkapan ISR di kedua negara kurang maksimal, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2014) yang mengatakan bahwa pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan.

Dilihat dari konsep *corporate governance* antara Indonesia dan Malaysia juga berbeda, dimana Indonesia menggunakan konsep *two tier system* sedangkan Malaysia menggunakan *one tier system*. Perbedaan konsep ini dapat pula menyebabkan perbedaan pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

**TABEL 4.19**  
**RINGKASAN SELURUH HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS**

<b>Kode</b>	<b>Hipotesis</b>	<b>Hasil</b>
<b>H<sub>1a</sub></b>	Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh Negatif terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	<b>Ditolak</b>
<b>H<sub>1b</sub></b>	Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh Negatif terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Bank Umum Syariah di Malaysia	<b>Diterima</b>
<b>H<sub>2a</sub></b>	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	<b>Ditolak</b>
<b>H<sub>2b</sub></b>	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Bank Umum Syariah di Malaysia	<b>Ditolak</b>
<b>H<sub>3a</sub></b>	Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	<b>Diterima</b>
<b>H<sub>3b</sub></b>	Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Bank Umum Syariah di Malaysia	<b>Ditolak</b>
<b>H<sub>4a</sub></b>	Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	<b>Ditolak</b>
<b>H<sub>4b</sub></b>	Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Bank Umum Syariah di Malaysia	<b>Ditolak</b>
<b>H<sub>5a</sub></b>	Struktur Kepemilikan Asing Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	<b>Ditolak</b>
<b>H<sub>5b</sub></b>	Struktur Kepemilikan Asing Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Bank Umum Syariah di Malaysia	<b>Ditolak</b>
<b>H<sub>6a</sub></b>	Struktur Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	<b>Ditolak</b>
<b>H<sub>6b</sub></b>	Struktur Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Bank Umum Syariah di Malaysia	<b>Ditolak</b>